

Wajib Baca: Munculnya Perpres No 20 Tahun 2018, Masih Adakah Peluang Buruh Lokal Bekerja ?



Tenaga Kerja Asing dari China

RIAUEXPRESS, JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), kini serbuan tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia semakin menimbulkan keresahan bagi pekerja lokal.

Kebijakan Pemerintah dengan mempermudah tenaga asing ini, dinilai berbagai pihak, akan mengorbankan masyarakat Indonesia dan sangat tidak berkeadilan bagi tenaga kerja lokal.

Demikian yang disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, bahwa Perpres tersebut, akan mengorbankan tenaga kerja lokal yang tidak bisa terserap dalam bekerja di lapangan, seiring masuknya investasi.

"Saya menduga, masuknya investasi ini, juga diikuti dengan masuknya buruh-buruh kasar (unskill workers) yang didatangkan langsung dari Negeri China, "ungkapnya di Jakarta, Kamis (12/04/18).

Menurut Said, jangankan ada Perpres, tidak ada Perpres saja buruh China datang menbanjiri Indonesia yang sudah tentu melanggar Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dan UUD 1945.

"Sehingga dengan adanya Perpres ini, maka patut diduga jumlah buruh kasar TKA China yang akan masuk ke Indonesia, akan berkali-kali lipat ganda jumlahnya. Akibatnya buruh lokal akan menjadi penonton di negerinya sendiri, "kesal dia.

Dikatakan, ppa yang dilakukan Pemerintah dengan mempermudah izin TKA itu, merupakan pengingkaran dan menciderai konstitusi dan berpotensi Presiden melanggar UUD 1945.

Sementara itu, Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai, Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tidak mengedepankan asas keadilan bagi rakyat Indonesia. Karena dengan Perpres tersebut Jokowi telah memberi kemudahan bagi TKA untuk masuk ke Indonesia.

"Belum lagi masalah target pertumbuhan ekonomi yang naik turun, membuat ekonomi dalam negeri tidak bergerak naik. Dan saya rasa Perpres ini sangat tidak berkeadilan buat tenaga kerja kita, "ujarnya.

Andrianto mengingatkan kembali tiap tahun angkatan kerja di Indonesia bertambah tiga juta jiwa. Dalam catatannya saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 100 juta jiwa. Namun, sambung Andrianto lapangan kerja yang tersedia hanya mampu menampung separuh.

Menurutnya sangat tidak masuk akal jika Jokowi membuka keran bagi TKA ke Indonesia. Apalagi janji kampanye untuk membuka lapangan kerja belum terwujud sepenuhnya.

?Padahal, dulu Jokowi berjanji akan buka lapangan kerja 10 juta pertahun. Pemerintahannya sudah berjalan 3 tahun, tapi ini tidak tercapai, maka tidak masuk akal bila pemerintah malah membuat policy permudah TKA, "tutupnya.

Menanggapi hal itu, sebelumnya Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (11/04/18) sore, seperti dilansir Kompas.com, meminta kepada Pemerintah transparan untuk menjelaskan serbuan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia.

SBY mengaku kerap mendapatkan pertanyaan mengenai serbuan TKA ke Indonesia. Namun dirinya tidak mempunyai data pasti tentang jumlah TKA di Indonesia seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

?Saya juga mendengar kecemasan yang sama, kalau tenaga kerja asing itu datang dalam jumlah yang banyak. Saya tidak punya angka, berapa banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ini. Dengarnya di sana ada, di sini ada, banyak sekali informasinya, banyak sekali isunya, "ujarnya. di Pendopo Agro Wisata PT Sidomuncul.

SBY justru meminta kepada pemerintah agar jujur menjelaskan persoalan tenaga kerja asing ini. Jika memang informasi tersebut tidak benar agar disampaikan secara jelas.

Menurut SBY, dalam kerja sama ekonomi antar-negara, jamak ditemukan pekerja lintas negara. Dalam posisi tertentu, keberadaan TKA masih bisa diterima. Namun dalam hal ini, pemerintah dituntut lebih berhati-hati, sebab jumlah pengangguran di Indonesia masih cukup banyak.**Gelora/Red.

Sumber: buserkriminal